

**PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN  
PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI BALI**

**Cokorda Gede Surya Putra Trisnu<sup>1</sup>  
I Ketut Suidiana<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
e-mail: cokdesurya@gmail.com

**ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks di tingkat nasional maupun regional, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan dalam menanggulangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran dan pendidikan secara simultan dan parsial terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 - 2017. Penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, dengan menggunakan data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi non perilaku. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel bebas yang dominan mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali adalah variabel pertumbuhan penduduk.

**Kata kunci:** Tingkat kemiskinan, pertumbuhan penduduk, pendidikan.

**ABSTRACT**

Poverty is a complex problem at the national and regional level, so that appropriate and sustainable strategies are needed in mitigating it. The purpose of this study was to determine the effect of population growth, unemployment and education simultaneously and partially on the poverty level of the Regency / City of Bali Province in the period 2011 - 2017. This research was conducted in all districts / cities in Bali Province, using secondary data, methods data collection using non-behavioral observation techniques. The analysis technique used is multiple linear regression. Based on the results of the analysis it was found that population growth, unemployment, and education simultaneously had a significant effect on poverty levels. Population growth partially has a positive and significant effect on poverty levels, while education partially has a negative and significant effect on poverty levels. The independent variable that predominantly affects poverty in the Regency / City of Bali Province is the variable population growth.

**Keywords:** *Poverty, population growth, education..*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan adalah permasalahan yang sering dialami oleh negara - negara berkembang (Vincent, 2009). Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi, sosial, kesehatan, pendidikan dan politik (Kembar Sri Budhi, 2013). Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara indonesia, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia disebabkan oleh fakta bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memiliki produktivitas yang rendah (Arndt dan Sundrum 2012). Kemiskinan merupakan masalah pokok yang bersifat multisektoral, yang menyangkut berbagai sektor kehidupan masyarakat mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sampai dengan ketenagakerjaan, sehingga diperlukan kebijaksanaan yang komprehensif untuk menanggulangi kemiskinan tersebut (Jember dan Swara, 2011). Indonesia terkenal dengan catatan tentang pengentasan kemiskinannya, tetapi garis kemiskinan nasionalnya adalah salah satu yang paling rendah di dunia (Arief dan Sumner, 2015). Kemiskinan seringkali dipahami sebagai suatu keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari - hari (Windia, 2015).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dialami oleh anggota masyarakat yang kurang beruntung disebabkan berbagai hal baik dari diri pribadi maupun dari faktor luar individu yang mengakibatkan mereka tidak berdaya dan tidak mampu untuk mengakses sistem sumber yang ada di sekitarnya (Bambang Rustanto, 2015). Pada tingkat nasional maupun regional, kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk menanggulangnya (Djayastra dkk.,

2016). Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan dengan maksimal karena kemiskinan dapat menimbulkan multi efek yang kurang positif bagi kesejahteraan rakyat. Kemiskinan tentu akan berdampak pada tingkat kesehatan, jika kesehatan masyarakat rendah, maka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan juga kecil, dan daya saing tenaga kerja lemah, lalu tingkat pengangguran pun naik yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan adalah sebuah keadaan yang serba kekurangan dialami oleh sekelompok orang, sehingga mereka tidak mampu untuk menikmati kesehatan yang layak, pendidikan yang tinggi, dan konsumsi makanan yang kurang layak dari segi kesehatan (Sirilius, 2017).

Pemerintah telah melaksanakan program - program pembangunan yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan akan tetapi kemiskinan masih menjadi masalah yang berkepanjangan, demikian juga bagi Provinsi Bali yang dikenal dengan destinasi pariwisatanya tidak luput dari masalah kemiskinan tersebut. Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas bagi pemerintah provinsi Bali.

**Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota kurun waktu tahun 2016 – 2017 (Ribuan Jiwa)**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jembrana	14.53	14.78
Tabanan	21.90	21.66
Badung	12.91	13.16
Gianyar	22.13	22.42
Klungkung	11.21	11.15
Bangli	11.66	11.76
Karangasem	27.12	27.02
Buleleng	37.55	37.48
Denpasar	19.17	20.70
<b>Bali</b>	<b>178.18</b>	<b>180.13</b>

Sumber : *BPS Provinsi Bali Tahun 2018*

Seperti terlihat pada tabel 1 jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2017 masih cukup tinggi yaitu sebanyak 180.130 jiwa, dimana terjadi peningkatan jumlah

penduduk miskin sebanyak 1.950 jiwa dari kurun waktu tahun 2016 ke tahun 2017. Dari segi jumlah penduduk miskin, Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali yaitu dengan 37.480 jiwa pada tahun 2017, lalu diikuti dengan Kabupaten Karangasem dengan jumlah penduduk miskin sebesar 27.020 jiwa dan yang mengejutkan Kabupaten Gianyar yang memiliki daerah pariwisata Ubud sebagai wilayahnya berada pada urutan selanjutnya dengan jumlah penduduk miskin sebesar 22.420 jiwa. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng bahkan mencapai angka 43.700 jiwa, tentu fakta tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi Bali.

**Tabel 2** **Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali kurun waktu tahun 2016 - 2017**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jembrana	5.33	5.38
Tabanan	5	4.29
Badung	2.06	2.06
Gianyar	4.44	4.46
Klungkung	6.35	6.29
Bangli	5.22	5.23
Karangasem	6.61	6.55
Buleleng	5.79	5.74
Denpasar	2.15	2.27
<b>Bali</b>	<b>4.25</b>	<b>4.25</b>

Sumber : *BPS Provinsi Bali Tahun 2018*

Dari segi persentase tingkat kemiskinan seperti terlihat pada tabel 1.2 Kabupaten Karangasem menjadi kabupaten dengan persentase tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 6,55 persen pada tahun 2017, lalu diikuti dengan Kabupaten Klungkung dengan persentase tingkat kemiskinan sebesar 6,29 persen dan Kabupaten Buleleng dengan persentase tingkat kemiskinan sebesar 5,74 persen. Kabupaten Buleleng dan Karangasem dengan fakta diatas menjadi dua kabupaten yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi baik dari segi jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan dibutuhkan upaya lebih keras serta inovasi dari pemerintah Kabupaten/Kota maupun pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan

program – program pengentasan kemiskinan agar kemiskinan dapat menurun secara konstan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan beberapa program untuk menanggulangi kemiskinan, antara lain yaitu Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bedah Rumah, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu, bantuan desa pakraman dan subak serta Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu). Semuanya merupakan program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas dan terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan, terdapat pula Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan sejak awal tahun 2010. PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan bagi anggota diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban KSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi (Budiadnyana dan Sandiasa, 2017). Tujuan pemberian bantuan itu yakni meningkatkan kualitas kesehatan keluarga sangat miskin, meningkatkan taraf pendidikan anak - anak keluarga miskin dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Program lainnya yaitu gerakan terpadu pengentasan kemiskinan (Gardu Paskin), program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan antara lain bantuan bedah rumah, pelayanan kesehatan, peningkatan SDM seperti pelatihan - pelatihan, penyediaan beasiswa bagi warga kurang mampu, revitalisasi pasar, penyediaan infrastruktur, pelayanan masyarakat seperti pembuatan KTP dan Akte gratis bagi masyarakat serta pemberdayaan masyarakat (Budiadnyana dan Sandiasa, 2017).

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi, hal ini dikarenakan sering terjadi kesalahan dalam pendataan masyarakat miskin baik karena

disengaja maupun tidak disengaja sehingga membuat program bantuan yang dijalankan tidak dapat berjalan dengan maksimal, seperti yang terlihat pada Tabel 1.2 bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan dalam 2 tahun terakhir telah mengalami penurunan. Namun, masih terjadi peningkatan persentase tingkat kemiskinan di empat kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Jembrana , Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar , sedangkan Kabupaten Badung tidak mengalami peningkatan maupun penurunan persentase tingkat kemiskinan. Data persentase tingkat kemiskinan ini menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali hal ini dipicu oleh pembangunan di Provinsi Bali yang cenderung bersifat pembangunan yang terpusat sehingga terjadi kesenjangan antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dibutuhkan peran yang lebih serius dari pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, agar tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dapat menurun secara merata dan konstan setiap tahunnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ingin diangkat dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan penduduk, pengangguran dan tingkat pendidikan.

Pertumbuhan penduduk memegang peranan penting dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Penduduk merupakan sejumlah manusia yang menempati suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan (*income per capita*) negara tersebut, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut (Subri, 2003 : 55). Suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan (Yulianto, 2018).

Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 2000) terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan (Saputra, 2011). Pertambahan jumlah penduduk yang cepat dapat menimbulkan masalah yang serius bagi kesejahteraan, oleh karena itu besarnya jumlah penduduk jika tidak diimbangi oleh dukungan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah seperti kemiskinan dan ketidakstabilannya kondisi nasional secara keseluruhan (Rohani, 2016).

Ada dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh penduduk pada pembangunan. Pertama, adalah pandangan pesimistis yang berpendapat bahwa penduduk (pertumbuhan penduduk yang pesat) dapat menghantarkan dan mendorong pengurasan sumberdaya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis, yang kemudian dapat memunculkan masalah –masalah sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan. Kedua adalah pandangan optimis yang berpendapat bahwa penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan prolisi inovasi teknologi dan institusional sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi sosial (Rohani, 2016). Populasi berdampak pada pembangunan ekonomi melalui ukuran populasi, tabungan, struktur buruh, kemajuan teknologi dan industrialisasi. Namun, dampak ini berinteraksi satu sama lain dalam jangka panjang (Wanjun, dkk., 2013). Jeon (2013) berpendapat bahwa salah satu penyebab utama dari pertumbuhan yang lambat di beberapa negara berpenghasilan menengah adalah

transformasi pertanian yang lambat. Teori Malthus dalam Skuosen (2009 : 85) pada intinya menyatakan bahwa sumber daya bumi tidak bisa mengimbangi kebutuhan populasi yang terus bertambah, akibatnya kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas berbanding terbalik dengan jumlah sumberdaya alam yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia yang bersifat terbatas, hal ini akan mendorong manusia mendekati garis kemiskinan karena persaingan yang cukup ketat dalam pemenuhan kebutuhan.

Ketika kualitas modal manusia angkatan kerja yang melakukan aktifitas ekonomi rendah maka pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menciptakan banyak persoalan terutama pada daerah yang memiliki modal yang kurang, teknologi masih sederhana, dan tenaga kerja yang kurang ahli, oleh karena itu pertumbuhan penduduk benar - benar dianggap dapat menjadi hambatan pembangunan ekonomi (Djayastra, dkk., 2016). Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menurut Lincoln akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya - upaya yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya penambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas (Arsyad, 2010 : 267). Peningkatan jumlah penduduk dapat menghambat proses pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Sehingga menyebabkan pendapat perkapita daerah yang rendah yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin (Solihin, 2018).

Faktor yang juga menjadi penyebab kemiskinan adalah tingkat pengangguran. Menurut Akinmulegun (2014) pengangguran dianggap sebagai akar dari kemiskinan. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk terhadap perekonomian, pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai (Subroto, 2012). Pengangguran itu sendiri dapat disebabkan oleh banyak sekali faktor sosial diantaranya para pekerja yang menjadi korban PHK perusahaan - perusahaan atau pabrik yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan. Ketika keadaan

ekonomi mengindikasikan laju kemajuan teknologi, industrialisasi, dan pembangunan ekonomi masih lambat dan tidak mengesankan maka keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan di negara tersebut (Ladipo dkk., 2013). Pengangguran dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan sosial dan dapat memicu konsekuensi yang tidak diinginkan dari kemiskinan, hal tersebut membuat usaha penurunan jumlah pengangguran menjadi tujuan pembangunan di negara - negara berkembang (Aiyedogbon and Ohwofasa, 2012). Keterkaitan antara tenaga kerja dan kemiskinan akan dilihat melalui pendekatan dengan melihat hubungan antara kemiskinan dan pengangguran. Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran, Artinya, ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Hal ini menunjukkan terjadi hubungan yang positif antara kemiskinan dan pengangguran (Seran, 2017).

Pengangguran dapat dilihat sebagai masalah sosial - ekonomi di mana, orang - orang yang terlatih maupun tidak terlatih, sesungguhnya bersedia dan mampu bekerja tetapi tidak dapat menemukan dan mendapatkan pekerjaan (Ekpo, 2011). Populasi yang tumbuh cepat dan perencanaan tenaga kerja yang tidak tepat bertanggung jawab atas pengangguran yang memicu meningkatnya kemiskinan (Akeremale dkk., 2015). Situasi ini telah berkontribusi besar terhadap masalah kemiskinan di kalangan penduduk. Kemiskinan, di sisi lain, dapat didefinisikan sebagai kelangkaan kebutuhan dasar manusia atau ketidakmampuan individu atau masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup (Abdullahi, 2011). Pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran, setengah menganggur atau kurangnya lahan produktif sebagai aset penghasil pendapatan merupakan hal yang akut bagi masyarakat miskin ketika dalam memperoleh kebutuhan paling dasar untuk makanan, air dan tempat tinggal adalah hal yang harus diperjuangkan pada setiap harinya (Kaluge dan Noor, 2017).

Memperbaiki kualitas pendidikan juga merupakan salah satu prioritas yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pendidikan adalah salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan yang diselenggarakan oleh negara yang bertujuan agar warga negaranya mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat mengurangi tingkat keterbelakangan suatu daerah. Keterbelakangan dan ketertinggalan dapat diatasi dengan adanya pendidikan yang diselenggarakan oleh negara untuk warga negaranya guna mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat mengurangi tingkat keterbelakangan dan ketertinggalan suatu daerah. Pendidikan dipandang sebagai investasi yang hasilnya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas (Amalia, 2012).

Pendidikan juga merupakan *human capital*, semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka akan meningkatkan kemampuan konsumsi mereka, sehingga dapat mengangkat kehidupan mereka dari kemiskinan (Wahyudi, dkk., 2013). Dalam jangka panjang tujuan dari pendidikan diarahkan kepada kegiatan yang menghasilkan tenaga-tenaga kerja terdidik yang merupakan investasi keahlian dan keterampilan didalam pembangunan (Helen, 2008). Pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan pembangunan manusia yang lebih baik, yang akan menciptakan manusia yang lebih terdidik dan sehat, tidak mengalami kelaparan dan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan sosial (Hukom, 2014). Kemajuan suatu negara dan pengembangan tenaga kerjanya adalah tujuan utama pendidikan. Melalui pendidikan, orang bisa mengembangkan ilmunya dan keterampilan agar dapat bertahan hidup (Ekpenyong dan Edokpolor, 2016).

Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan maka pendidikan seseorang perlu ditingkatkan (Wahyudi dkk., 2013). Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kualitas sumberdaya manusia juga akan

semakin baik dan akan mempengaruhi produktivitas. Ketika produktivitas meningkat maka penghasilan atau upah yang didapat juga akan meningkat sehingga akan membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan (Harlik dan Amir, 2013). Pendidikan sangat terkait dengan kemiskinan, karena orang tua miskin cenderung enggan mengirim anak - anak mereka untuk pendidikan karena kondisi kemiskinan yang dihadapi (Afzal dkk., 2017). Sebagian besar keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem tidak mampu untuk membiayai satu atau semua anak mereka ke sekolah. Selain itu, di banyak negara, pendidikan dasar masih membutuhkan biaya, selain fakta bahwa keluarga miskin tidak dapat mengatasi keterbatasan keuangan ini, ada juga masalah ekonomi realitas. Anak - anak harus berhenti sekolah untuk mendapatkan uang di mana "kesejahteraan" keluarga bergantung pada anak. Kesimpulannya, kurangnya pendidikan membuat kemiskinan meningkat dan kemiskinan yang telah terjadi juga dapat membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan (Manea dkk., 2015).

Pendidikan tinggi dipandang sebagai sumber inovasi yang akan mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Eric, 2016). Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi kualitas tenaga kerja yang akan meningkatkan produktivitas serta dapat meningkatkan pendapatan individu serta meningkatkan konsumsi mereka sehingga mereka terhindar dari kemiskinan (Sirilius Seran, 2017). Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar, karena pendidikan memberi kemampuan untuk berkembang lewat ilmu pengetahuan yang dimiliki, pendidikan juga menambah kesadaran untuk hidup layak dan bermartabat (Solihin, 2018). Pendidikan merupakan investasi untuk masa depan dalam bentuk penambahan hasil kerja yang akan mempengaruhi produktivitas kerja sehingga akan mengurangi jumlah penduduk miskin (Solihin, 2018). Mencapai dan mempertahankan daya saing ekonomi serta memenangkan perang melawan pengangguran dan kemiskinan hanya dapat diwujudkan, jika pendidikan yang baik dan efektif diberikan kepada semua kalangan,

bukan hanya untuk beberapa kalangan (Ekpenyong dan Edokpolor, 2016). Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat I menyatakan setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 menyebutkan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 - 2017.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 - 2017.
- 3) Untuk menganalisis variabel dengan kontribusi dominan dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 – 2017.

## **METODOLOGI PENULISAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk asosiatif (hubungan kasualitas). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali yang mencakup semua Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dipilihnya penelitian ini karena dari data yang diperoleh masih terdapat disparitas tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Ini mencerminkan belum maksimalnya dan belum meratanya kebijakan yang diberikan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Jenis data berdasarkan sifatnya terbagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota, data jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, data tingkat pengangguran Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota, dan data rata – rata lama sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali., sedangkan data kualitatif yang digunakan yaitu berupa

keterangan mengenai lokasi penelitian dan mengenai program - program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

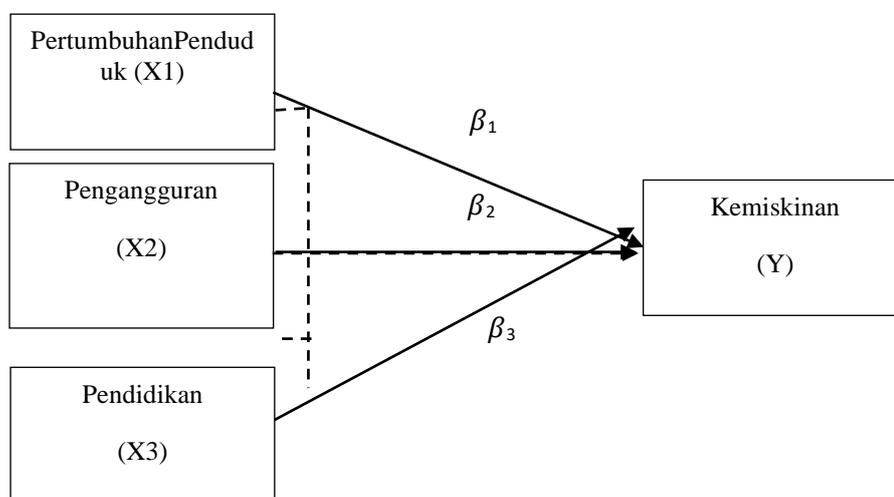
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Dalam hal ini berupa data jumlah penduduk miskin Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota, data jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, tingkat pengangguran menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali, dan data rata – rata lama sekolah menurut Kabupaten/Kota di Bali. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi non perilaku, yaitu observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau perusahaan dan hanya sebagai pengumpul data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik, serta uji *Standardized Coefficient Beta*. Teknik analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011-2017. Bentuk model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \mu_i \dots\dots\dots(3)$$

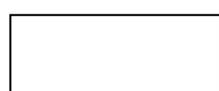
Keterangan:

- Y = Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali
- X<sub>1</sub> = Pertumbuhan Penduduk
- X<sub>2</sub> = Pengangguran
- X<sub>3</sub> = Pendidikan
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = Koefisien Regresi masing - masing variabel independen
- α = Intersep ( konstanta)
- μ<sub>i</sub> = Tingkat kesalahan



**Gambar 1 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Keterangan :



: Indikator

————> : Pengaruh Parsial

-----> : Pengaruh Simultan

Konsep penelitian ini menganalisis tentang pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Dalam penelitian yang dilakukan Oleh Astika dan Suardikha (2016) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Periode 1999 – 2013, yaitu pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali periode 1999-2013. Pada penelitian yang dilakukan Oleh Rohani (2016) juga menyatakan bahwa variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika jumlah penduduk meningkat maka akan mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harsuti dan Retnowati (2015) menunjukkan bahwa variabel pengangguran bertanda positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap

kemiskinan di Jawa Tengah. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 1 % tidak menurunkan kemiskinan tetapi menaikkan kemiskinan sebesar 0,099 %. Kenaikan tingkat pengangguran yang bertanda positif akan mengakibatkan kemiskinan menguat. Hasil penelitian Permana dan Arianti (2012) juga menyatakan bahwa tingkat pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai.

Penelitian Sirilius Seran (2017) menyatakan bahwa antara pendidikan dengan kemiskinan memiliki hubungan negatif dan signifikan. Semakin tinggi pendidikan maka semakin rendah kemiskinan penduduk. Hasil penelitian Wahyudi., dkk (2017) juga menyatakan bahwa variabel pendidikan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan pendidikan dasar seseorang telah memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian dasar yang dapat digunakan untuk menjauhkan dirinya dari keterbelakangan dan kebodohan serta kemiskinan. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk tersebut (Djayastra, dkk., 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011-2017.

### **Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali**

Tingkat kemiskinan dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Semakin banyak jumlah penduduk miskin artinya semakin parah permasalahan kemiskinan yang terjadi. Jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten di Provinsi Bali berfluktuasi setiap tahunnya dalam kurun waktu 2011 - 2017. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota kurun waktu tahun 2011 – 2017 (Ribuan Jiwa)**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jembrana	17.60	15.30	14.92	15.80	15.83	14.53	14.78
Tabanan	24.20	21	22.49	24.40	24.05	21.90	21.66
Badung	14.60	12.51	14.55	15.40	14.40	12.91	13.16
Gianyar	26	22.63	20.80	22.50	22.89	22.13	22.42
Klungkung	10.70	9.30	12.21	12.30	12.11	11.21	11.15
Bangli	11.40	9.90	12	13	12.74	11.66	11.76
Karangasem	26.10	22.68	27.85	29.70	30.33	27.12	27.02
Buleleng	37.90	32.96	40.32	43.70	43.43	37.55	37.48
Denpasar	14.50	12.66	17.63	19.20	20.94	19.17	20.70
<b>Bali</b>	<b>183.10</b>	<b>158.95</b>	<b>182.77</b>	<b>196</b>	<b>196.71</b>	<b>178.18</b>	<b>180.13</b>

Sumber : *BPS Provinsi Bali Tahun 2018*

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat diketahui jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota setiap tahunnya masing - masing mengalami fluktuasi. Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Buleleng sebanyak 37.480 orang. Sedangkan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah dari 9 kabupaten/kota pada tahun yang sama yaitu Kabupaten Klungkung sebanyak 11.150 orang.

### **Perkembangan pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali**

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan Penduduk ialah suatu perubahan populasi sewaktu - waktu, dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi memakai “per waktu unit” untuk pengukuran. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu fertilitas (angka kelahiran), mortalitas (angka kematian), dan

migrasi. Malthus meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis. Sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan, dan berbagai macam penderitaan manusia.

Philip Hauser menganggap kemiskinan tercipta dari tidak optimalnya tenaga kerja dalam bekerja dikarenakan adanya ketidakcocokan antara pendidikan dan pekerjaan yang ditekuni. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang masuk ke pasar kerja sehingga memaksa pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan secepat - cepatnya walaupun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya akibat ketatnya persaingan dalam mencari kerja. Kedua pemaparan ahli tersebut bermuara ke satu arah yakni jumlah penduduk yang besar sebagai penyebab timbulnya kemiskinan. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 - 2017 :

**Tabel 4 Jumlah penduduk Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota kurun waktu tahun 2011 – 2017 (ribu jiwa)**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jembrana	264.4266.2	268	269.8	271.6	273.3	323.2	
Tabanan	425.1427.8	430.6	433.3	435.9	438.5	466.6	
Badung	560.9575	589	602.7	616.4	630.468.3		
Gianyar	476.5	481.2	486	490.5	495.1	499.6	492.7
Klungkung	172.1	172.9	173.9	174.8	175.7	176.7	215.8
Bangli	217.4	218.7	220	221.3	222.6	223.8	264.9
Karangasem	400	402.2	404.3	406.6	408.7	410.8	545.3
Buleleng	630.3	634.3	638.3	642.3	646.2	650.1	814.3
Denpasar	810.9	828.9	846.2	863.6	880.6	897.3	638.5
<b>Bali</b>	<b>3.957.6</b>	<b>4.007.2</b>	<b>4.056.3</b>	<b>4.104.9</b>	<b>4.152.8</b>	<b>4.200.1</b>	<b>4.230</b>

Sumber: *BPS Provinsi Bali Tahun 2018*

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat diketahui jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 - 2017. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2017 adalah Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 814.300 orang. Sedangkan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terendah pada tahun yang sama adalah Kabupaten Klungkung yaitu sebanyak 215.800 orang.

### **Perkembangan Tingkat pengangguran di Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

Selain pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Berikut adalah tabel tingkat pengangguran di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali :

**Tabel 5 Tingkat pengangguran Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota periode tahun 2011 – 2017 (persen)**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Rata - rata</b>
Jembrana	3.53	1.97	3.46	2.95	1.59	1,59	0.67	2.25
Tabanan	2.80	2.18	0.80	2.25	1.73	1,73	1.79	1.89
Badung	2.28	1.67	0.80	0.48	0.34	1,34	0.48	1.05
Gianyar	2.11	1.81	2.23	1.43	1.93	1.93	1.02	1.78
Klungkung	2.35	2.09	2.08	1.94	1.39	1.39	0.94	1.74
Bangli	0.81	0.90	0.77	0.67	1.72	1.72	0.48	1.01
Karangasem	2.70	1.31	1.39	2.06	2.15	2.15	0.72	1.78
Buleleng	3.28	3.13	2.15	2.74	2.04	2.04	2.41	2.54
Denpasar	4.56	2.57	2.72	2.32	3.54	3.54	2.63	3.12
<b>Bali</b>	<b>2.95</b>	<b>2.10</b>	<b>1.83</b>	<b>1.90</b>	<b>1.99</b>	<b>1.89</b>	<b>1.48</b>	<b>2,02</b>

Sumber: *BPS Provinsi Bali Tahun 2018 (data diolah)*

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui tingkat persentase pengangguran di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011-2017. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas terhadap tingkat pengangguran antar wilayah di Provinsi Bali, dimana selama tujuh tahun terakhir yaitu kurun waktu tahun 2011 -2017, rata – rata tingkat pengangguran tertinggi disandang oleh kota Denpasar yaitu sebesar 3,12 persen dan selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, yaitu masing – masing sebesar 2,54 persen dan 2,25 persen. Angka rata - rata tingkat pengangguran yang terendah disandang oleh Kabupaten Bangli, Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung dengan nilai masing – masing yaitu sebesar 1,01 persen, 1,05 persen dan 1,74 persen. Angka persentase pengangguran Provinsi Bali sebesar 1,48 pada tahun 2017 tentu jauh lebih baik dibandingkan angka persentase pengangguran nasional pada tahun yang sama yang mencapai

5,50 persen, hal ini menunjukkan sinyal yang positif namun masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang persentase penganggurannya masih harus diperhatikan yaitu Kota Denpasar dengan 2,63 persen dan Kabupaten Buleleng dengan 2,41 persen.

### Perkembangan Pendidikan di Provinsi Bali

Tingkat pendidikan merupakan hal penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkualitas sumber dayanya, begitupun sebaliknya. Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Berikut adalah tabel keadaan tingkat pendidikan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

**Tabel 6 Rata – rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 – 2017 (dalam satuan tahun)**

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana	7.237.257.277.307.547.597.62						
Tabanan	7.687.767.837.918.078.108.43						
Badung	8.969.079.189.299.449.909.99						
Gianyar	7.73	7.99	8.24	8.28	8.49	8.86	8.87
Klungkung	6.68	6.81	6.88	6.90	6.98	7.06	7.46
Bangli	5.97	6.01	6.35	6.38	6.41	6.44	6.80
Karangasem	4.60	5.22	5.34	5.39	5.42	5.48	5.52
Buleleng	6.39	6.51	6.63	6.66	6.77	6.85	7.03
Denpasar	10.59	10.82	10.90	10.96	11.02	11.14	11.15
<b>Bali</b>	<b>7.74</b>	<b>7.77</b>	<b>8.05</b>	<b>8.10</b>	<b>8.26</b>	<b>8.36</b>	<b>8.55</b>

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat diketahui rata - rata lama sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 - 2017. Kabupaten yang memiliki rata - rata lama sekolah tertinggi adalah Kota Denpasar yaitu 11,15 tahun pada tahun 2017, sedangkan pada tahun yang sama Kabupaten yang memiliki rata - rata lama sekolah terendah adalah Kabupaten Karangasem yaitu 5,52 tahun.

### Analisis Data

#### Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel – variabel penelitian yaitu jumlah amatan nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan standar deviasi. Untuk mengukur nilai sentral dari distribusi data dapat dilakukan dengan pengukuran rata – rata (*mean*) sedangkan standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata – ratanya. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

### Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan penduduk (X1)	63	172.10	897.30	455.6905	205.17622
Pengangguran (X2)	63	.34	4.56	1.8935	.91574
Pendidikan (X3)	63	4.60	11.15	7.7046	1.64273
Kemiskinan (Y)	63	9.30	43.70	20.2498	8.69243
Valid N (listwise)	63				

Sumber : *Hasil olahan data, 2018*

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa total data observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 63. Hasil statistik deskriptif masing - masing dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertumbuhan Penduduk (X1) Variabel Pertumbuhan Penduduk memiliki nilai minimum sebesar 172.10 ribu jiwa yaitu menunjukkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Klungkung pada tahun 2011. Nilai maksimum sebesar 897.30 ribu jiwa yaitu menunjukkan jumlah penduduk tertinggi terdapat pada Kota Denpasar pada Tahun 2016. Variabel Pertumbuhan penduduk memiliki nilai rata - rata sebesar 455.690 ribu jiwa dengan nilai standar deviasi sebesar 205.176 ribu jiwa. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata - rata, yang artinya sebaran data terkait laju pertumbuhan penduduk pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah merata.

Pengangguran (X2) Variabel Pengangguran memiliki nilai minimum sebesar 0,34 persen yaitu menunjukkan persentase tingkat pengangguran terendah terdapat pada Kabupaten Badung pada tahun 2015 dan 2016. Nilai maksimum sebesar 4,56 persen yaitu

menunjukkan persentase tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada Kota Denpasar pada Tahun 2011. Variabel pengangguran memiliki nilai rata - rata sebesar 1,8935 persen, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,91574 persen. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata - rata, yang artinya sebaran data terkait persentase tingkat pengangguran pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah merata.

Pendidikan (X3) Variabel pendidikan memiliki nilai minimum sebesar 4,60 tahun yaitu menunjukkan rata – rata lama sekolah terendah terdapat pada Kabupaten Karangasem pada tahun 2011. Nilai maksimum sebesar 11,15 tahun yaitu menunjukkan rata – rata lama sekolah tertinggi terdapat pada Kota Denpasar pada Tahun 2017. Variabel Pendidikan memiliki nilai rata - rata sebesar 7,70 tahun dengan nilai standar deviasi sebesar 1,64 tahun. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata - rata, yang artinya sebaran data terkait rata- rata lama sekolah pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah merata.

Kemiskinan (Y) Variabel kemiskinan memiliki nilai minimum sebesar 9,30 ribu jiwa yaitu menunjukkan jumlah penduduk miskin terendah terdapat pada Kabupaten Klungkung pada tahun 2012. Nilai maksimum sebesar 43,70 ribu jiwa yaitu menunjukkan jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat pada Kabupaten Buleleng pada tahun 2014. Variabel kemiskinan memiliki nilai rata - rata sebesar 20,24 ribu jiwa, dengan nilai standar deviasi sebesar 8,69 ribu jiwa. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata - rata, yang artinya sebaran data terkait kemiskinan yang dinilai berdasarkan jumlah penduduk miskin pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah merata.

### **Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memastikan hasil yang diperoleh memenuhi asumsi dasar di dalam analisis regresi. Hasil uji asumsi klasik yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Hasil dari uji asumsi klasik yang diolah disajikan sebagai berikut:

### 1) Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data yang digunakan normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Apabila koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal.

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.68898986
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.071
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 <sup>c,d</sup>

**Tabel 8 Hasil Uji Normalitas**

Sumber: *Hasil olahan data, 2018*

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov (K-S)* sebesar 0,071, sedangkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 lebih besar dari nilai *alpha* 0,05.

### 2) Uji Autokorelasi

Suatu model regresi jika mengandung gejala autokorelasi, maka prediksi yang dilakukan dengan model tersebut akan tidak baik, atau dapat memberikan hasil prediksi yang menyimpang. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji *Durbin-Watson (DW-test)* atau *d* statistik terhadap variabel pengganggu (*disturbance error term*).

**Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin -
-------	---	----------	-------------------	----------------------------	----------

					Watson
1	0,842 <sup>a</sup>	0,709	0,694	4,80672	1,815

Sumber : Hasil olahan data, 2018

Nilai DW 1,815, nilai ini bila dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% dengan jumlah sampel 63 (n) dan jumlah variabel independen (K=3) maka diperoleh nilai  $du$  1,6932. Nilai DW 1,821 lebih besar dari batas atas ( $du$ ) yakni 1,6932 dan kurang dari  $(4 - du)$   $4 - 1,6932 = 2,3068$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

### 3) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF Kurang dari 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari multikolinieritas.

**Tabel 10 Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Pertumbuhan penduduk ( $X_1$ )	0,541	1,847	Bebas multikol
Pengangguran ( $X_2$ )	0,863	1,159	Bebas multikol
Pendidikan ( $X_3$ )	0,605	1,653	Bebas multikol

Sumber : Hasil olahan data, 2018

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dan VIF dari seluruh variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinieritas.

### 4) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang dilakukan dengan uji *Glejser*. Jika tidak ada satu pun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap nilai *absolute*

*residual* atau nilai signifikansinya di atas 0,05 maka tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	1.213	1.694		.716	.477
PP (X1)	-.266	.346	-.103	-.770	.444
Pengangguran (X2)	.123	.343	.048	.359	.721
Pendidikan (X3)	.332	.207	.207	1.602	.115

Sumber: *Hasil olahan data, 2018*

Pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa nilai Signifikansi dari variabel pertumbuhan penduduk adalah sebesar 0,444, nilai signifikansi variabel pengangguran adalah sebesar 0,721, nilai signifikansi variabel Pendidikan adalah sebesar 0,115. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap absolute residual. Dengan demikian, model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil yang ditunjukkan pada Tabel 12 berikut :

**Tabel 12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	4.096	.362		11.299	.000
PP (ZX1)	.977	.095	.977	10.239	.000
Pengangguran (ZX2)	.103	.076	.103	1.369	.176
Pendidikan (ZX3)	-.885	.090	-.885	-9.803	.000

Sumber : *Hasil olahan data, 2018*

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti yang disajikan pada Tabel 12 diatas, maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 4.096 + 0,977 X1 + 0,103 X2 - 0,885 X3$$

Hasil ini menunjukkan seluruh variabel bebas memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,050 terkecuali yaitu variabel X2 dengan nilai signifikansi sebesar 0,176. Hal ini berarti

bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan pada variabel terikatnya terkecuali variabel X2 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,176 > 0,05$ .

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Signifikansi koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel yang diidentifikasi (pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan) tepat digunakan memprediksi tingkat kemiskinan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Uji ini sering juga disebut dengan uji F.

**Tabel 13 Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43.959	3	14.653	47.919	.000 <sup>a</sup>
	Residual	18.041	59	.306		
	Total	62.000	62			

Sumber : Hasil olahan data, 2018

Dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) = 0,05 ;  $F_{tabel} = 2,76$  ,  $F_{hitung} = 47,919$  dan nilai signifikansi sebesar 0,000, dengan demikian maka  $F_{hitung} = 47,919 > 2,76$  dan nilai signifikansi  $0,000 < (\alpha) = 0,05$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti model seluruh variabel yaitu pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena tingkat kemiskinan pada seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali secara nyata. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah sebesar 0,694. Ini berarti naik turunnya tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan sebesar 69,4 persen sedangkan sisanya sebesar 30,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimunculkan di dalam model penelitian ini.

## **Uji Signifikansi Koefisien Beta Regresi secara Parsial (uji t)**

### **1) Pengaruh pertumbuhan penduduk (X1) terhadap kemiskinan**

Dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) = 0,05 ;  $t_{tabel} = 1,67065$ ,  $t_{hitung} = 10,239$ , dan nilai signifikansi sebesar 0,000, dengan demikian maka  $t_{hitung} = 10,239 > 1,67065$  dan nilai signifikansi  $0,000 < (\alpha) = 0,05$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 - 2017. Nilai koefisien regresi sebesar 0,977 memiliki arti bahwa setiap kenaikan seribu jiwa penduduk maka akan diikuti dengan peningkatan kemiskinan (Y) sebesar 0,977 ribu jiwa dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Candra Mustika (2011) dan Irhamni (2017) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Menurut teori Malthus (dalam Skuosen, 2009: 85) populasi penduduk cenderung bertambah menurut deret ukur (secara geometris), sedangkan produksi makanan (sumber daya alam) cenderung bertambah menurut deret hitung (secara aritmatika). Akibatnya ketidak seimbangan antara sumberdaya bumi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Dengan kata lain jika perkembangan sumber daya tidak dapat mendukung perkembangan penduduk maka akan menyebabkan kemiskinan.

Menurut Bank Dunia (2016), sebagian besar penduduk Indonesia hidup disekitar garis kemiskinan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk juga mengakibatkan semakin bertambahnya beban yang harus ditanggung kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhannya. Karena bertambahnya beban tersebut, memungkinkan suatu keluarga yang sebelumnya hidup berada di atas garis kemiskinan, jadi masuk dalam kategori miskin, karena kemampuan dalam pemenuhan kebutuhannya (pendapatan) tetap, tapi jumlah kebutuhannya bertambah.

### **2) Pengaruh pengangguran (X2) terhadap kemiskinan**

Dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) = 0,05 ;  $t_{tabel} = 1,67065$ ,  $t_{hitung} = 1,369$ , dan nilai signifikansi sebesar 0,176, dengan demikian maka  $t_{hitung} = 1,369 < 1,67065$  dan nilai signifikansi  $0,176 > (\alpha) = 0,05$  ini berarti  $H_0$  diterima. Dengan demikian pengaruh variabel pengangguran secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 - 2017 tidak dapat disimpulkan.

### **3) Pengaruh pendidikan (X3) terhadap kemiskinan**

Dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) = 0,05 ;  $t_{tabel} = 1,67065$ ,  $t_{hitung} = - 9,803$ , dan nilai signifikansi sebesar 0,000, dengan demikian maka  $t_{hitung} = - 9,803 < 1,67065$  dan nilai signifikansi  $0,000 < (\alpha) = 0,05$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali kurun waktu tahun 2011 - 2017. Nilai koefisien regresi sebesar  $- 0,885$  memiliki arti bahwa setiap kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1 tahun rata - rata lama sekolah maka akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan (Y) sebesar 0,885 ribu jiwa dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Sutrisna (2014) berjudul Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali, pada hasil uji regresi linier berganda terhadap variabel pendidikan yang diproyeksikan dengan angka rata - rata lama sekolah (MYS) menunjukkan bahwa pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Selain itu penelitian ini juga menyatakan bahwa semakin tinggi jenjang

pendidikan yang ditempuh, maka kemungkinan untuk menjadi golongan non - miskin meningkat.

Hal serupa terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Mega Septyana dan Yuliarmi (2013), yang berjudul Beberapa Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. Pada hasil penelitian ini variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali 2007-2011. Menurut Simmons (dikutip dari Todaro, 2000), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Kebijakan yang terkait dengan peningkatan kapasitas manusia (*humancapital development*) sangat diperlukan untuk membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan kronis. Salah satunya adalah melalui pendidikan, dimana pendidikan merupakan investasi jangka panjang mereka agar dapat secara permanen keluar dari kemiskinan (Inna Dariwardani, 2014).

### Penentuan Variabel Dominan

Variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat dapat dilihat dari Standardized Coefficients Beta. Dalam analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pertumbuhan penduduk (X1), pengangguran (X2) dan pendidikan (X3), sedangkan variabel terikat adalah kemiskinan (Y). Untuk memperjelas variabel bebas yang memiliki pengaruh dominan, maka dapat dilihat rangkuman standardized coefficients beta dan ranking variabel bebas pada Tabel 14 berikut.

**Tabel 14 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

<b>Rangking</b>	<b>Variabel</b>	<b>Standardized coefficientsbeta</b>	<b>Pengaruh</b>
1	X1	0,997	Signifikan
2	X3	-0,885	Signifikan
3	X2	0,103	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil olahan data, 2018

Berdasarkan tabel 14 terlihat bahwa variabel X1 (Pertumbuhan Penduduk) mempunyai nilai *Standardized coefficients beta* sebesar 0,977 dimana nilai ini lebih besar dari nilai *standardized coefficients beta* variabel lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk (X1) berpengaruh paling dominan terhadap kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Standardized coefficients beta* yang dimiliki oleh variabel X1 bertanda positif, hal ini yang berarti bahwa jika pertumbuhan penduduk meningkat maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat, begitupun sebaliknya

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 1) berdasarkan hasil uji statistik deskriptif masing - masing dalam penelitian ini dapat dijelaskan pertumbuhan penduduk (X1) dimana sebaran data terkait laju pertumbuhan penduduk yang dilihat berdasarkan jumlah penduduk pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sudah merata, pengangguran (X2) dimana sebaran data terkait tingkat persentase pengangguran pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sudah merata, pendidikan (X3) dimana sebaran data terkait tingkat pendidikan yang dinilai berdasarkan rata - rata lama sekolah pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sudah merata, kemiskinan (Y) dimana sebaran data terkait kemiskinan yang dinilai berdasarkan jumlah penduduk miskin pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sudah merata; 2) hasil uji F (*Ftest*) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; 3) pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; 4) pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; 5) variabel X1 (Pertumbuhan Penduduk) adalah variabel yang memiliki nilai *standardized coefficients beta* yang paling besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel Y

(Kemiskinan) lebih banyak dipengaruhi oleh variabel X1 (Pertumbuhan Penduduk) dibandingkan dengan variabel bebas lainnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di tersebut, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1) masyarakat harus berani berinovasi dan bergerak di sektor informal agar dapat membuat lapangan pekerjaan serta menggali potensi diri dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun agar meningkatkan kualitas dari masyarakat itu sendiri. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan menciptakan kesejahteraan yang baik bagi masyarakat itu sendiri, 2) guna tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, disini diperlukan campur tangan pemerintah dalam hal pengambilan keputusan dan bagaimana arah kebijakan yang harus dilakukan. Pemerintah di Provinsi Bali tetap harus fokus menjaga agar pertumbuhan penduduk yang tercipta di wilayahnya adalah pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan kualitas yang baik sehingga dapat mengurangi beban pembangunan di Provinsi Bali dan dapat menjadi aset bagi perekonomian Provinsi Bali itu sendiri. Pemerintah harus memberikan lapangan pekerjaan, meningkatkan mutu pendidikan. Serta Pemerintah perlu lebih banyak melaksanakan pelatihan - pelatihan guna memberdayakan sumber daya manusia atau masyarakat umum guna terciptanya optimalisasi pertumbuhan ekonomi, dimana SDM ini sebagai motor penggerak perekonomian wilayahnya. Dan yang terakhir diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi Bali lebih menggerakkan sektor informal dan sektor – sektor selain sektor pariwisata. Mengingat pentingnya peningkatan sektor informal untuk menekan kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

## **REFERENSI**

Abdullahi, S. M. 2011. Entrepreneurship Skills Needed by TVET Students for Effective Learning in Technical Colleges of Northern Nigeria. *Journal of Science, Technology, Mathematics and Education (JOSTMED)*, 7 (2), hal. 140 - 144.

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, .....[Cokorda Gede Surya Putra Trisnu, I Ketut Sudiana]

- Afzal, M. dan Malik, E. M. dan Begum, I. dan Sarwar, K. dan Fatima, H. 2017. Relationship among Education, Poverty and Economic Growth in Pakistan : An Econometric Analysis. *Journal of Elementary Education*, 22 (1) hal. 23 – 45.
- Aiyedogbon, J. O. dan Ohwofasa, B. O. 2012. Poverty and Youth Unemployment in Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*, 3 (20), hal. 269 – 279.
- Akeremale, I. dan Olotu, A. dan Salami, R. 2015. Poverty and Rate of Unemployment in Nigeria. *International Journal of Management*, 2 (1), hal.1 – 4.
- Akinmulegun, S. O. 2014. Unemployment and Poverty Paradigm in Nigeria: Challenges and Prospects. *International Journal of Management and Administrative Sciences*, 2 (3), hal. 16 – 23.
- Amalia, Fitri. 2012. Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. *Econosains*, 10 (2).
- Arianti, F. dan Permana, A. Y. 2012. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004 – 2009. *Diponegoro Journal of Economics*, 1 (1), hal.1 – 8.
- Arief Anshory Yusuf dan Sumner, A. 2015. Growth, Poverty, And Inequality Under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51 (3), hal. 323 – 348.
- Arndt, H. W. dan Sundrum, R. M. 2012. Employment, Unemployment and Under-Employment. . *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 16 (3), hal. 61 – 82.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Astika Sari, N. Dan Suardikha Natha, K. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Periode 1999 – 2013. *E – Jurnal EP Unud*, 5 (12), hal. 1493 – 1512.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2009. Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia. Denpasar.
- Bank Dunia. (2016). *Ketimpangan yang Semakin Lebar*. Jakarta : Bank Dunia
- Budiadnyana, I. N. dan Sandiasa, Gede. 2017. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah Fisip*. 8 (1), hal.1 – 13.
- Candra Mustika. 2011. Pengaruh PDB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990 – 2008. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1 (4), hal. 12 – 23.

- Djayastra, I. K. dan Murjana Yasa, I. G. W. dan Purnama Margareni, N. P. T. 2016. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Piramida*, 12 (1), hal.101 – 110.
- Edokpolor, J. E. dan Ekpenyong, E. L. 2016. Winning the War Against Unemployment and Poverty in Nigeria : is there A Role for TVET-Private Sector Partnership. *Journal of Nigerian Vocational Education*, 1 (2), hal. 125-132.
- Ekpo, A. H. 2011. Nigeria and its Growing Unemployment Crisis. *Broad Street Journal*, (7), hal. 28.
- Eric, A. H. 2016. Will More Higher Education Improve Economic Growth ?. *Oxford Review of Economic Policy*, 32 (4), hal. 538–552.
- Harsuti dan Retnowati, D. 2015. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto, hal. 608 – 618.
- Helen, Ayres. 2008. Education And Opportunity As Influences On Career Development: Findings From A Preliminary Study In Eastern Australian Tourism. *Journal of Hospitality*. Program Director, Tourism Programme, University of Canberra, 5(1) : 16-28.
- Hukom, Alexandra. 2014. Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7 (2), hal. 120-129.
- Inna Dariwardani, N. M. 2014. Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) Di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008 – 2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7 (1), hal. 7 – 15.
- Irhamni. 2017. Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986 – 2015. *Skripsi Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Jember, I. M. dan Swara, Yogi Wayan. 2011. Kemiskinan Di Bali. *Piramida*, 7 (2), hal. 1 – 22.
- Jeon,Shinyoung. 2013.Agricultural Transformation and the Escape from the Middle-Income-Country Trap: Challenges Facing Small Farmers in Indonesia in a Time of Green Restructuring.*Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49 (3) : 383 – 384
- Kaluge, David dan Noor Zuhdiyati. 2017. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11 (2), hal. 27 – 31.

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, .....[Cokorda Gede Surya Putra Trisnu, I Ketut Sudiana]

Kembar Sri Budhi, M. 2013. Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali : Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6 (1), hal. 1 - 6.

Ladipo, M. K. dan Akhuemonkhan, I. A. dan Raimi, L. (2013). Technical Vocational Education and Training (TVET) as Mechanism for Sustainable Development in Nigeria (SD) : Potentials, Challenges and Policy Prescriptions. *Presentation at CAPA International Conference*, 3 (8).

Manea, D. dan Mihai, M. Dan Titan, E. 2015. Education and Poverty. *Procedia Economics and Finance*, 32, hal. 855 – 860.

Rohani. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*.

Rustanto, Bambang. 2015. *Menangani Kemiskinan*. Bandung : PT Remaja Indonesia.

Saputra, W. A. 2011. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah. *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*.

Sirilius Seran. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10 (2), hal. 59 – 71.

Solihin. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Pendidikan, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Kabupaten / Kota Kepulauan Riau pada tahun 2010 – 2016. *Skripsi Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta*.

Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Todaro, M.P. dan Stephen C. S. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

Utama, Made Suyana. 2009. *Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar : CV Sastra Utama.

Vincent, B. 2009. The Concept Poverty towards Understanding in the Context of Developing Countries Poverty qua Poverty. *Journal of Sustainable Development*. 2 (2).

Wahyudi, Dicky dan Tri Wahyu Rejekiingsih. 2013. Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*. 2 (1). H. 1 - 15.

Wanjun, Y. dan Tomoko, K. dan Shigeyuki, H. 2014. An Empirical Analysis of the Relationship between Economic Development and Population Growth in China. *Applied Economics*, 45 (33), hal. 4651 – 4661.

Windia, Wayan. 2015. Sekali Lagi Tentang Pengentasan Kemiskinan (Di Bali). *Piramida*, 11 (1), hal.1 - 7.